

## **EVALUASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL TAHAP PEMBERANTASAN DI DESA MOJOGEMI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

*(Evaluation of Functional Literacy Program at Eradication Stage in Mojogemi Village, District of Sukowono, Jember Regency)*

R. Faizal Wijaya Kusuma, Agus Suharsono, M. Hadi Makmur  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[E-mail: DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

### **Abstract**

*Functional literacy program is one of programs to overcome illiteracy problem. The program is divided into two stages, that is, elimination stage through basic literacy program and maintenance stage by independent literacy program. One of regions in Jember Regency in which functional literacy program has been implemented is Mojogemi Village. It is necessary to conduct a structured and deep evaluation on policy in order that the results of the program can be valid and scientifically accountable. The research applied descriptive, qualitative type, and the data were collected by in-depth interview, observation and documentation. Method of analysis used was interactive model which consisted of four activity steps, that is, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawing.*

**Keywords: Evaluation, Public Policy, Functional Literacy, Program**

## Pendahuluan

Pembangunan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena merupakan salah satu langkah kongkrit untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun tujuan bangsa dari Negara Indonesia yang secara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di alinea IV yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam konteks administrasi publik, salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa tersebut adalah melalui kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2008:100-101) yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945, kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut.”

Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan bangsa tersebut, khususnya pada tujuan mencerdaskan bangsa, maka yang harus dilakukan pemerintah yaitu membuat kebijakan pembangunan di sektor pendidikan. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu, masyarakat, bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju dan sejahtera. Dengan pendidikan maka bangsa Indonesia akan mempunyai keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama pada era globalisasi saat ini. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Olsen dan Codd (dalam Nugroho,

2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan di era globalisasi.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, hal ini secara jelas telah disebutkan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) yaitu, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kemudian, dalam ayat (5) disebutkan pula bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan pendidikan sepanjang hayat”.

Berpijak pada undang-undang di atas, maka pembangunan di bidang pendidikan harus dilaksanakan merata diseluruh tanah air. Artinya, benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, usia, dan gender.

Penjelasan di atas merupakan tatanan normatif, dalam kehidupan nyata, pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Selama ini memang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikatakan telah menuju pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun secara realitas masih cukup banyak diantara kelompok masyarakat yang tidak atau belum dapat menikmati pendidikan karena alasan tertentu baik karena ketidakterjangkauan biaya, tempat maupun kesempatan. Salah satu indikatornya adalah masih adanya masyarakat terbelakang, yaitu masyarakat yang masih menyandang buta aksara. Seseorang yang buta aksara tentu akan menghadapi hambatan dalam mengakses informasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang pada akhirnya bermuara pada kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembangunan di sektor pendidikan sampai saat ini masih belum merata. Masih adanya penyandang buta aksara tentu akan menghambat pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, penyelesaian buta aksara tersebut mutlak harus segera dituntaskan dan diprioritaskan, karena salah satu aspek penentu dalam keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan suatu bangsa adalah dilihat dari tingkat keaksaraan penduduknya, yaitu di mana kebutuhurupan merupakan

salah satu indikator untuk menetapkan tingkat pembangunan sumber daya manusia/indek pembangunan manusia (IPM) atau *human development indeks* (HDI).

Bertolak pada permasalahan tingginya jumlah masyarakat penyandang buta aksara di Kabupaten Jember dan mengingat bahwa program, KF merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jember dalam memberantas buta aksara sejak tahun 2005, penulis melihat bahwa perlu untuk dilakukan penelitian evaluasi yang terstruktur dan mendalam agar dapat diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang program KF. Sebab, Melalui evaluasi dapat diketahui apakah hasil yang telah dicapai program KF tahap pemberantasan tersebut telah sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pemikiran tersebutlah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional Tahap Pemberantasan Di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2002:16) kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Selanjutnya Carl Fredrich (dalam Winarno, 2002:16) mendefinisikan kebijakan secara lebih luas lagi, yaitu sebagai berikut.

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan.”

Sedangkan Jenkins (dalam Wahab, 2004:4) merumuskan bahwa,

“Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih

berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.”

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah proses pelaksanaan suatu keputusan oleh aktor-aktor yang berwenang (kelompok, pemerintah, dan lain-lain) untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Setelah memahami dengan seksama beberapa pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, adalah penting sekali untuk menguraikan makna dari kebijakan publik. Dalam konteks ilmu administrasi negara, konsep kebijakan selalu melekat dengan konsep kebijaksanaan negara atau publik (*public policy*) karena kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik dan kebijakan negara selalu mengarah mengabdikan kepada kepentingan masyarakat (*public interest*).

### Konsep Evaluasi Kebijakan

#### Pengertian Evaluasi Kebijakan

Berbicara tentang studi kebijakan publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah evaluasi kebijakan. Nugroho (2008:472) menjelaskan bahwa, “sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan.”

Mengacu pada tahap-tahap proses kebijakan, evaluasi kebijakan berada di tahap akhir. Hal ini sesuai dengan penjelasan Winarno (2002:165) yang menyatakan bahwa bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

Pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Kemudian banyak ahli yang mengemukakan pengertian mengenai evaluasi kebijakan publik. Secara singkat evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2008:119). William N. Dunn memberikan arti pada istilah evaluasi yaitu sebagai berikut:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).



Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan di mana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.

Lebih lanjut Thomas R. Dye (dalam Parsons, 2008:547) mengemukakan evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhadjir (dalam Widodo, 2011:112) menjelaskan bahwa:

“Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/ atau target kebijakan yang ditentukan.”

Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsep evaluasi kebijakan adalah menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Berbagai tipe evaluasi kebijakan yang telah dipaparkan di atas hanyalah sebagian saja. Sejatinya masih banyak lagi tipe atau model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, dapatlah dipahami bahwa dari berbagai variasi tipe atau model evaluasi kebijakan, ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan atau mengembangkannya, dan ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya, sisi praktisnya, fokus analisisnya, ruang lingkungannya, serta *timing* pelaksanaan evaluasinya.

Berdasarkan berbagai tipe atau model evaluasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka peneliti menggunakan evaluasi kebijakan dengan pendekatan formal. Alasan peneliti menggunakan pendekatan formal adalah karena menyesuaikan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program KF, di mana keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari hasil pencapaian tujuan atau target dan peneliti dalam mengukur tingkat capaian tujuan atau target program tersebut berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti; tujuan dan sasaran yang tercantum dalam pedoman program KF (kesesuaian dengan hasil /tujuan dan sasaran yang diharapkan), peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program KF, wawancara

dengan pembuat kebijakan atau administrator program dan sebagainya

### **Konsep Program Keaksaraan Fungsional Pengertian Keaksaraan Fungsional**

Keaksaraan fungsional sendiri terdiri dari dua konsep yaitu keaksaraan yang secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, dalam pengertian yang lebih luas keaksaraan diartikan sebagai suatu pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua warga negara dan salah satu fondasi bagi penguasaan kecakapan-kecakapan hidup lain. Sedangkan istilah fungsional dalam keaksaraan, berkaitan erat dengan fungsi dan atau tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil dari pembelajaran tersebut benar-benar bermanfaat, bermakna, dan berfungsi atau fungsional bagi peningkatan mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakatnya.

Program KF dimaksudkan sebagai kegiatan untuk memberikan kesempatan belajar kepada warga masyarakat yang tidak bersekolah, belum bekerja, dan berasal dari keluarga tidak mampu, melalui program ini diharapkan warga belajar berkesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak atau usaha yang mandiri. Program KF merupakan bentuk pelayanan pendidikan non formal untuk membelajarkan warga masyarakat yang buta aksara agar memiliki kemampuan untuk menulis, membaca dan berhitung (calistung). Program keaksaraan ini juga memberikan bekal berbagai macam keterampilan kepada para warga belajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini paradigma yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat pencapaian target program KF tahap pemberantasan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Muhajirin pada tahun 2012 dengan mengacu pada target atau hasil yang diharapkan yang tertuang dalam petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan penyelenggaraan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri tahun 2012. Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Pada

penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive* (sample bertujuan) dan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2008:85), "sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut adalah orang – orang yang dianggap ahli dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga peneliti akan mudah untuk menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai narasumber dan diwawancarai sebagai berikut:

1. Bapak Abidin Rohim, S.Pd (Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukowono dan pengawas program)
- 2) Bapak Mulyono, S.Sos (Staf PNFI UPT Pendidikan Kecamatan Sukowono dan pengawas program)

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Primer
- b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Interaktive Model Analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005:91) dimana dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

### Hasil Penelitian

Keberhasilan upaya pemberantasan buta aksara melalui Program Keaksaraan Dasar di Desa Mojogemi, salah satunya dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang telah dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mengukur tingkat pencapaian target dalam penelitian ini akan berlandaskan pada hasil yang diharapkan yang tertuang dalam Juknis Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Tahun 2012, yaitu meningkatnya kemampuan calistung dan minimal 80% peserta didik memperoleh SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

Meningkatnya Kemampuan Membaca, Menulis, dan Berhitung

Untuk mengukur meningkatnya kemampuan WB dalam membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara, maka dilihat dari keadaan WB sebelum dan sesudah mengikuti Program Keaksaraan Dasar. Adapun hasil dari penelitian mengenai indikator tersebut, yaitu sebagai berikut.

#### 1) Meningkatnya kemampuan membaca

Untuk meningkatkan kemampuan membaca WB, terdapat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Poernomo selaku tutor dan koordinator tutor di Desa Mojogemi pada tanggal 5 Mei 2013, berikut pernyataannya:

"Untuk pertemuan awal kegiatan pembelajaran membaca, para WB dikenalkan dulu dengan huruf-huruf abjad sampai WB mengenal dan hafal huruf-huruf abjad. Kemudian secara bertahap ke suku kata, sampai pada kalimat pendek, ya intinya awal-awal diajarkan yang sederhana-sederhana dulu, kemudian berlanjut ke tingkat yang lebih sulit."

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Bapak Taufik selaku salah satu tutor yang peneliti wawancarai pada tanggal 10 Mei 2013:

"Awalnya pembelajaran membaca dimulai dengan pengenalan huruf. Mulai dari A sampai Z. Setelah itu kita ajarkan baca dari satu kata kemudian naik jadi satu kalimat, kemudian bertahap sampai pada satu paragraf. Nah, setelah WB telah menguasai kemampuan dasar membaca, kemudian diberikan materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya membaca daftar harga, undangan, resep, dll."

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian target berdasarkan indikator meningkatnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) para peserta didik dapat disimpulkan cukup berhasil, karena sebagian besar para warga belajar (WB) kemampuan calistungnya sudah meningkat. Adapun rincian jumlah peserta didik Program Keaksaraan Dasar di Desa Mojogemi yang kemampuan membacanya meningkat sebesar 60%, kemampuan menulis sebesar 58,3%, berhitung sebesar 81,6% dan jumlah rata-rata peningkatan dari ketiga kemampuan tersebut berada di atas 50%, yaitu sebesar 66,63%. Selanjutnya, tingkat pencapaian target berdasarkan indikator minimal 80% WB berhasil mendapatkan surat keterangan melek aksara (SUKMA), dapat disimpulkan tidak berhasil. Hal

ini dikarenakan jumlah WB yang berhasil mendapatkan SUKMA berjumlah 27 WB dari total 60 WB yang ikut serta, yang apabila diprosentasekan hanya sebesar 45%. Faktor-faktor yang mendukung tingkat pencapaian target antara lain; tingginya motivasi belajar WB, tingginya motivasi tutor dalam menjalankan tugas, mata pencaharian penduduk, sarana dan prasarana, kekompakan kelompok belajar. Kemudian, faktor-faktor yang menghambat tingkat pencapaian target antara lain; rendahnya motivasi belajar WB, rendahnya motivasi tutor dalam menjalankan tugas, mata pencaharian WB, usia dan kesehatan penduduk.

### Kesimpulan dan Saran

1. Tingkat pencapaian target berdasarkan indikator meningkatnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) para peserta didik, dapat disimpulkan cukup berhasil, karena sebagian besar para warga belajar (WB) kemampuan calistungnya sudah meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian bahwa jumlah WB yang termasuk dalam kategori meningkat kemampuan membacanya sebesar 60%, kemampuan menulis sebesar 58,3%, berhitung sebesar 81,6% dan jumlah rata-rata peningkatan dari ketiga kemampuan tersebut berada di atas 50%, yaitu sebesar 66,63%.
2. Selanjutnya mengenai tingkat pencapaian target berdasarkan indikator minimal 80% WB berhasil mendapatkan surat keterangan melek aksara (SUKMA), dapat disimpulkan tidak berhasil. Hal ini dikarenakan jumlah WB yang berhasil mendapatkan SUKMA berjumlah 27 WB dari total 60 WB, yang apabila diprosentasekan hanya sebesar 45%.
3. Faktor-faktor yang mendukung tingkat pencapaian target antara lain: tingginya motivasi belajar WB, tingginya motivasi tutor dalam menjalankan tugas, mata pencaharian penduduk, sarana dan prasarana, kekompakan kelompok belajar. Kemudian, faktor-faktor yang menghambat tingkat pencapaian target antara lain: rendahnya motivasi belajar WB, rendahnya motivasi tutor dalam menjalankan tugas, mata pencaharian WB, usia dan kesehatan penduduk.

### Saran

1. Dalam perekrutan tutor sebaiknya lebih selektif lagi, mengingat ditemukannya tutor dalam penelitian ini yang kurang memiliki motivasi

dalam menjalankan tugas yang pada akhirnya juga berdampak terhadap motivasi para WB. Tutor merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya pencapaian target yang diinginkan, hal ini disebabkan karena tugas tutor bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga terdapat tugas-tugas yang lain seperti memberikan motivasi dan semangat kepada para WB dalam mengikuti program tersebut.

2. Sebaiknya tetap dilakukan monitoring dan pendampingan terhadap para WB, walaupun program telah selesai hingga dilaksanakannya program lanjutan. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga kelanggengan kemampuan keaksaraan dasar WB yang telah diperoleh atau tidak kembali buta aksara, sehingga hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Program Keaksaraan Dasar tidak sia-sia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Bungin, B. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Terjemahan oleh Wibawa, Asitadani, Hadna dan Purwanto. 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, A. H. 1995. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kusnadi, dkk. 2005. *Pendidikan Keaksaraan: Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. H dan Martini, H. M. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan oleh Santoso. Jakarta: Kencana.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

